

# EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH KEPALA DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Nely Erlina Sari

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: erlinasari.nes@gmail.com

## ABSTRAK

*Sebagai Kampung KB pertama di Kecamatan Parigi serta terpilihnya hasil dari beberapa pertimbangan berupa partisipasi masyarakat yang dirasa akan mendukung juga ketersediaan Kepala Desa sebagai yang memiliki wilayah. Maka dipandang perlu melakukan penelitian dengan kajian evaluasi program Kampung KB. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Kepala Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi dalam Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer yaitu 8 informan dan data sekunder berupa literature yang mendukung dan sesuai dengan bahan penelitian. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa hasil Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Kepala Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih belum optimal adapun hambatan yang ditemukan yaitu : 1) Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Pokja Kampung KB kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa 2) Kurangnya sosialisasi sehingga pemahaman masyarakat tentang kampung KB terbatas 3) Pembinaan dari PLKB Non PNS belum optimal sehingga Pokja Kampung KB belum optimal dalam menjalankan kegiatan di Kampung KB sedangkan perbaikan program yang dihasilkan adalah fokus dalam perbaikan hambatan yang ditemukan.*

**Kata Kunci :** *Evaluasi Program, Kepala Desa, Kampung KB.*

## PENDAHULUAN

Program KKBPK yang dituangkan dalam berbagai kegiatan di Kampung KB memiliki peran strategis yang dapat

mempercepat kemajuan suatu bangsa. Program KKBPK bukan sekedar program kontrasepsi semata, melainkan program keluarga yang sangat banyak

manfaat. Berangkat dari itu, pemerintah berupaya untuk mempercepat upaya penguatan kembali program KKBPK, salah satunya dengan meluncurkan program percepatan seperti Program Kampung KB yang baru saja dicanangkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Januari 2016.

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah program bidang kependudukan yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah (Nawacita) butir 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan Nawacita kedelapan ialah melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.

Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan melalui pendekatan 8 fungsi keluarga.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah diberi kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur daerah otonomnya sendiri. Tidak terlepas juga pada masalah kependudukan, karena Pemerintah Daerahlah yang mengetahui keadaan serta kondisi masyarakat secara utuh di lini lapangan lewat koordinasi dengan Pemerintah Desa dan *stakeholder* terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah yaitu; (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan (4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi. (Juknis Kampung KB 2015).

Di wilayah setingkat Desa atau nama lainnya Pokja Kampung KB dibina oleh UPT DBP3A (Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tingkat kecamatan terkait.

Adapun tugas daripada UPT KBP3A Kecamatan Parigi di Kampung KB hanya dalam hal penyuluhan dan pembinaan yang diejawantahkan dalam 4 program, yaitu : Pertemuan rutin Kampung KB; MusDes yang dihadiri oleh Pokja/Pengurus Kampung KB dan Perangkat Desa; Tri Bina, yaitu BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKB (Bina Keluarga Balita) dengan sasaran peserta keluarga yang mempunyai lansia, keluarga yang mempunyai remaja dan remaja itu sendiri, keluarga yang mempunyai balita dan Lokakarya, dimana lebih membahas apa yang menjadi potensi masyarakat dan nantinya difasilitasi masyarakat ingin seperti apa.

Sedangkan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kampung KB diserahkan kepada Pokja Kampung KB yang dirasa lebih mengenal situasi dan kondisi wilayah.

Melalui Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 476/Kpts.22-Huk/2019 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangandaran bahwa untuk menunjang keberhasilan program KB tingkat Kabupaten Pangandaran dan untuk kesinambungan peran masyarakat sebagai kekuatan penggerak pembangunan penduduk dan keluarga, perlu menetapkan lokasi Kampung KB sebagai sasaran pembinaan program. Hingga saat ini sudah ada 31 Kampung KB yang terbentuk di Kabupaten Pangandaran yang tersebar di setiap kecamatan.

Desa Cibenda sebagai wilayah Kampung KB pertama di Kecamatan Parigi dipilih karena beberapa kriteria.

Desa Cibenda memiliki jumlah Keluarga Pra S tertinggi dibandingkan desa lain. Yakni sebanyak 1.063 dari 2.620 KK. Sedangkan Desa Karangjaladri sebanyak 216 dari 539 KK serta Desa Parigi sebanyak 424 dari 1.632 KK. Namun pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu : Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat; Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah; Ketiga, partisipasi aktif masyarakat.

Sebagai Kampung KB pertama dan pada idealnya menjadi Kampung KB percontohan di Kecamatan Parigi. Kampung KB Desa Cibenda tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih baik dari segi perencanaan hingga output dari Kampung KB itu sendiri dalam menyukseskan program KKBPK di lini lapangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:36-27) dijelaskan bagaimana Operasionalisasi Kampung KB. Kegiatan rutin Kampung KB dilaksanakan secara terus menerus oleh pengurus Pokja Kampung KB termasuk seksi-seksi dan keluarga terhadap program KKBPK dan lintas sektor terkait melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Diharapkan dengan adanya Kampung KB, keluarga semakin

meningkat kesejahteraannya dan tidak terdapat lagi keluarga miskin di Kampung KB. Miskin tidak hanya kekurangan ekonomi tapi terhindar dari segala bentuk kemiskinan diantaranya : Miskin Harta, Miskin Ibadah, Miskin Sosial, Terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan.

Kampung KB di Desa Cibenda telah ada sejak 2017. Maka sangatlah perlu adanya penelitian terkait Evaluasi Program Kampung KB untuk mengetahui sumber masalah agar terciptanya perbaikan dan tercapainya tujuan. Impian keluarga sejahtera pun bisa terwujud.

Berdasarkan hasil observasi awal, bahwa Pelaksanaan Kampung KB Desa Cibenda masih kurang optimal. Belum optimalnya Pokja Kampung KB dalam mempublikasikan Program Kampung KB kepada masyarakat luas; Kampung KB Desa Cibenda tidak berkembang dengan baik setelah berjalan selama 2 tahun dan Belum lengkapnya administrasi kesekretariatan Kampung KB.

Dalam mewujudkan tujuan program Kampung KB diperlukan sinergitas yang bagus antara *stakeholder* terkait. Guna menunjang kelancaran kegiatan Kampung KB baik dari segi pendanaan juga inovasi. Kepala Desa sebagai kepala wilayah memegang peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan Kampung KB disamping peran dari Pokja Kampung KB sendiri serta masyarakat selaku sasaran utama dalam program ini. Juga lembaga pemerintah baik itu Dinas ataupun UPTD dan OPD

lainnya yang memiliki tujuan yang sama.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:13) : Kampung KB adalah Satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

Pembangunan keluarga sejahtera maknanya identik dengan pengentasan kemiskinan, karena tujuannya sama meningkatkan derajat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Secara sederhana keluarga itu akan sejahtera, apabila : bebannya tidak berat, ekonominya kuat dan ketahanannya mantap.

Kestabilan dan peningkatan ekonomi keluarga tidak selalu harus

berpenghasilan tinggi, akan tetapi lebih cenderung pada keseimbangan antara pengeluaran tidak melebihi pendapatan, menggali sumber ekonomi baik individual, keluarga maupun dalam lingkungan kelompok masyarakat sehingga tercapai rendahnya beban ketergantungan atau dalam istilah demografi disebut *dependency ratio*. Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam program KKBP adalah memantapkan jiwa wirausaha, permodalan, produksi dan pengemasan, pemasaran, kemitraan, dan kemandirian yang dikemas dalam kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) adalah bagian dari pengentasan kemiskinan keluarga.

Ketahanan keluarga harus diawali dengan kualitas masing-masing anggota keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang mempunyai akhlak, nilai-nilai moral yang baik dan tentunya harus dilandasi dengan pendidikan dan pemahaman agama yang kuat untuk diimplementasikan dalam keluarga dan masyarakat, hal tersebut sebagai landasan keluarga menjadi keluarga yang baik, harmonis, tidak mudah bercerai-berai sehingga terwujudnya ketahanan keluarga yang tangguh.

Ketiga unsur di atas baik perkawinan dan pengaturan kelahiran, ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga bisa tercapai apabila keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Paling sedikit ada 8 fungsi keluarga yaitu : fungsi agama, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi

reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya maupun pembinaan lingkungan.

Pelaksanaan delapan fungsi keluarga tidak bisa hanya dilaksanakan masing-masing keluarga, akan tetapi ada keterkaitan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain yang terhimpun dalam kesatuan di lingkungan terdekat. Itulah makna pembentukan Kampung KB masa kini dan masa yang akan datang.

Desa Cibenda merupakan salah satu desa di Kecamatan Parigi. Desa Cibenda merupakan desa dengan RTM (Rumah Tangga Miskin) terbanyak dibanding Desa lain se-kecamatan Parigi, adanya partisipasi masyarakat dengan Pemerintah Desa, CU/PUS nya dibawah rata-rata, dengan dekat pesisir pantai, terdapat pemukiman yang kumuh. Dipilih menjadi Kampung KB percontohan untuk mewakili Kecamatan Parigi karena hal tersebut di atas. Desa Cibenda memiliki 5 dusun. Terdiri dari Dusun Sucen, Dusun Budiasih, Dusun Cibenda, Dusun Sinargalih dan Dusun Patrol. Dari kelima dusun ini dusun Cibenda yang dipilih untuk menerapkan Program Kampung KB karena PosKB yang akan turut mengurus bertempat di Dusun Cibenda, dusun yang paling dekat dengan Desa, juga tingkat partisipasi masyarakatnya lebih dibandingkan yang lain.

Kedudukan Kepala Desa di Kampung KB. Sebagai penanggung jawab kegiatan. Adapun tugas secara

jelasanya sesuai dengan yang ada dalam Buku Pedoman Kampung KB (2017:27) sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Kampung KB dengan sektor terkait;
- c. Mengusahakan anggaran dari dana Desa serta pihak luar untuk keperluan Kampung KB.

Dalam pasal 8 ayat 4 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Kepala Dusun atau yang disebut dengan Kepala Kewilayahan merupakan perangkat desa yang termasuk dalam pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan pembantu Kepala Desa yang bertugas sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pasal 17 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran dijelaskan fungsi Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun sebagai pembantu Kepala Desa di wilayahnya : merencanakan kegiatan kepala dusun.

Sebagai Ketua di Kampung KB berikut penjelasan tugas Kepala Dusun

di Kampung KB sesuai dengan yang dijabarkan dalam Buku Pedoman Kampung KB (2017:28) adalah sebagai berikut :

- a. menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung KB;
- b. membimbing dan membina seluruh Pokja;
- c. melakukan koordinasi dengan semua pihak.

## **METODE**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut U. Silalahi (2012:27) menyatakan pentingnya penelitian deskriptif sangat jelas menonjol dalam ilmu–ilmu sosial. Dari penelitian deskriptif, terutama bagi ilmu–ilmu sosial, banyak *imponderabilia* (hal-hal yang nampaknya tidak penting, tetapi pada hakikatnya sangat berperan seperti nilai-nilai dsb) dari kehidupan sosial sehari-hari dapat dideskripsikan. Penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada 5 dimensi evaluasi menurut Weiss.

Data primer dalam penelitian dilakukan observasi dan wawancara

mendalam dengan informan yang mengetahui dan terlibat langsung dalam Program Kampung KB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana oleh Kepala Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal yaitu tidak adanya koordinasi yang baik antara Pokja Kampung KB dengan Pemerintah Desa dalam hal perencanaan Program Kerja Kampung KB sehingga menyebabkan Pokja Kampung KB mandiri dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya tanpa ada bantuan dari Pemerintah Desa selaku pemegang wilayah, kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh PLKB Non PNS kepada Pokja Kampung KB sehingga Pokja Kampung KB belum sepenuhnya memahami tupoksinya juga kurangnya kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pembuatan kegiatan yang membutuhkan kerja sama dengan beberapa pihak baik dalam hal keselarasan tujuan juga dalam hal pendanaan serta kurang meluasnya pemahaman yang dimiliki masyarakat terkait Kampung KB.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

### 1. Dampak dari Program

A. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan/diprogramkan oleh Pokja Kampung KB

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan/program yang diadakan oleh Kampung KB asalkan masyarakat diberi tahu dalam artian jika ada suatu pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat terlebih bila sifatnya gratis maka antusias masyarakat sangat tinggi. Dibuktikan dengan saat ada pelayanan KB gratis yang dilaksanakan di Posyandu masyarakat yang membutuhkan pelayanan reproduksi pasti mendatangi. Lalu bila ada pembinaan dari Kampung KB terkait budidaya jamur misalnya masyarakat sebenarnya antusias akan tetapi terdapat hambatan yaitu anggaran yang dipakai harus dari uang saku pribadi terlebih dahulu. Juga saat masyarakat dimintai sumbangan untuk warga lain yang membutuhkan memberikan dengan sukarela tanpa ada yang keberatan. Akan tetapi sering kali masyarakat tidak mengetahui kegiatan tersebut berasal dari Kampung KB dikarenakan petugasnya sama dengan kader Posyandu dan/PKK.

B. Berjalannya kegiatan di masing-masing seksi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proker yang berjalan belum sepenuhnya maksimal walaupun memang ada yang sangat berjalan dan berkelanjutan tapi masih ada proker yang jalan di tempat. Ini sesuai dengan jawaban dari hampir semua informan yang menerangkan bahwa yang paling kurang dari proker/seksi Kampung KB adalah di bagian seksi ekonominya.

Belum adanya potensi ekonomi yang serius digeluti oleh masyarakat dan Pokja Kampung KB sehingga bisa menjadi ciri khas dari Kampung KB Desa Cibenda. Juga dari PLKB Non PNS selaku Pembina Desa Cibenda yang mengatakan keberhasilan seksi-seksi juga tergantung dari binaan PLKB Non PNS. Apakah pembinaannya yang kurang atau justru tidak dimengerti oleh Pokja sehingga ke depannya diperlukan komunikasi lagi.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan Pokja Kampung KB kurang bertanggung jawab melaksanakan proker/tugasnya disebabkan karena kesibukan mereka masing-masing di samping menjadi Pokja Kampung KB. Mereka merangkap jabatan sebagai kader Posyandu dan/ Kader PKK juga sebagai Ibu Rumah Tangga terlebih menjadi Pokja Kampung KB merupakan relawan dalam artian tidak ada insentif/gaji/tunjangan.

C. Adanya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber anggaran Kampung KB itu APBD untuk monev, DAK untuk Rakor, Musdes dan kegiatan Tri Bina. Sarana pra sarana anggaran dari Desa. Adapun yang diberikan oleh Dinas merupakan turunan dari provinsi dan pusat itu pun hanya untuk pertemuan-pertemuan pembinaan SDM dalam

artian untuk melakukan pelatihan semacam workshop bagi masyarakat. Tindak lanjut apabila masyarakat hendak mengimplementasikan hasil dari pembinaan tersebut haruslah mengeluarkan dana/modal sendiri. Peneliti juga menemukan bahwa penyebab fungsi ekonomi tidak berjalan karena tidak adanya dana/anggaran disebabkan kurangnya kerja sama Kampung KB dengan lintas sektor terkait. Adapun yang berperan dalam kerja sama lintas sektor adalah PLKB Non PNS selaku Pembina, Pemerintah Desa selaku pejabat wilayah juga Dinas yang membawahi program kampung KB di Kabupaten. Jadi tidak hanya mengandalkan usaha Pokja apalagi masyarakat saja tapi optimalnya kerja sama antara Pemerintah juga Kampung KB juga pelaku usaha.

D. Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang 8 fungsi keluarga.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa sarana pra sarana Kampung KB Desa Cibenda sudah baik terlebih Kampung KB Desa Cibenda sudah memiliki Sekretariat permanen dan bisa menunjang pelaksanaan kegiatan di Kampung KB. Nilai lebihnya adalah bisa dijadikan *role model* bagi Kampung KB lain khususnya di Kecamatan Parigi.

## 2. Pencapaian Tujuan

A. Menjalankan 8 fungsi keluarga dilaksanakan di setiap keluarga

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan menyatakan bahwa hampir semua 8 fungsi keluarga dilakukan oleh semua keluarga. Karena

sudah menjadi kebiasaan sehari-hari terutama dalam hal peribadahan, lalu reproduksi yang memang biasanya juga sudah ada di Posyandu. Iuran kematian yang diperoleh dari swadaya masyarakat. Serta adanya kelompok/latihan tari tradisional. Juga kelompok remaja dalam hal pengajian. Tetapi pelaksanaannya tidak sempurna harapan dari Kampung KB.

Namun bukan berarti karena 8 fungsi keluarga ini sudah dilaksanakan di setiap keluarga menjadi satu-satunya tolak ukur untuk menilai bahwa program Kampung KB berhasil, karena belum ada yang ditonjolkan dari luar kebiasaan. Misalnya melakukan sesuatu hal dari fungsi tersebut yang bisa menghasilkan manfaat dan menambah penghasilan serta menaikkan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Peran serta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan

Koordinasi antara Pemdes dengan Pokja Kampung KB belum berjalan baik. Walaupun memang hubungannya harmonis. Ditandai dengan tidak adanya laporan baik secara tertulis, dokumentasi maupun administrasi dari Pokja Kampung KB kepada pihak Pemdes. Sehingga Pemdes tidak bisa mengukur dan melihat sejauh mana proker Kampung KB berjalan. Karena adanya Kampung KB merupakan penunjang bagi pembangunan desa.

### 3. Memberikan Kontribusi

#### A. Terfasilitasinya data kependudukan masyarakat (KTP, KK, Akta, KIA, BPJS)

Berdasarkan hasil penelitian. Terdapat beberapa pandangan yang kontradiktif terkait pelayanan data kependudukan yang dilakukan oleh Pokja Kampung KB. Dari pihak Pokja dan masyarakat yang diwawancarai merasakan dampaknya. Merasa terbantu atas pelengkapan persyaratannya juga pemberian informasi.

Lain halnya pandangan dari Kepala Desa bahwasanya dikatakan membantu Pemerintah itu ketika terjalin koordinasi sehingga tidak adanya hal yang tumpang tindih. Dikarenakan pendataan seperti ini sudah dilakukan oleh RT & RW. Maka dari itu proker yang ada di Pokja Kampung KB alangkah lebih baik jika disosialisasikan kepada sekitar khususnya dikoordinasikan dengan RT & RW terkait hal pendataan penduduk.

Maka, kesimpulan yang bisa ditarik terkait hal di atas adalah koordinasi dari Pokja Kampung KB perlu dilaksanakan kembali atau di follow up bila memang dulu sudah pernah melakukan sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Terlebih kepada Kepala Desa selaku Pemerintahan yang menaungi wilayah Kampung KB berada.

#### B. Terfasilitasinya pendidikan kejar paket

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa informan mengatakan bahwa tidak tahu dari pihak Kampung KB mengadakan pendidikan kejar paket. Meskipun demikian menurut penuturan Pokja Kampung KB peserta yang ada terbilang cukup antusias dikarenakan walaupun sudah cukup tua tetapi

semangat untuk melanjutkan atau menyambung pendidikan masih ada.

Namun berdasarkan observasi memang ada pendidikan kejar paket dan pesertanya pun ada. Dalam artian mereka yang mengetahui cukup antusias dalam mengikuti pendidikan kejar paket.

Ini membuktikan bahwa sosialisasi dari Pokja Kampung KB terhadap proker yang dilakukan tidak merata.

#### C. Terfasilitasinya pelayanan kesehatan berupa reproduksi dan KB

Berdasarkan penelitian, pelayanan kesehatan reproduksi dan KB ini dari Pokja Kampung KB hanya ikut ketika ada Posyandu. Pokja menginformasikan kepada masyarakat jika ada pelayanan kesehatan reproduksi KB gratis. Adapun masyarakat merasa terbantu terlebih bila pelayanannya gratis.

Hambatan yang didapat itu ketika suami tidak mengizinkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Petugas tidak bisa memaksakan karena memang bila ada kejadian yang tidak diinginkan misalnya tidak cocok dan timbul penyakit lain maka Pemerintah pun tidak bertanggung jawab penuh.

#### 4. Membuat Keputusan (Kebijakan)

##### A. Terlaksananya monitoring atau pengawasan di setiap kegiatan Kampung KB

Monitoring oleh pihak UPT selalu ada 1 bulan sekali dalam agenda khusus pembinaan Pokja Kampung KB. Hanya saja saat dimonitoring oleh UPT tidak ditemukan kesalahan/pun kekurangan,

tapi ketika dilakukan evaluasi oleh Dinas ditemukan kekurangan.

Dan ada kesalah pahaman terkait jawaban dari Kepala Desa yang memosisikan diri sebagai Pembina Kampung KB sedangkan dalam struktural Kepala Desa sebagai pelindung/penanggung jawab. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya pemahaman dari Kepala Desa terkait Kampung KB.

##### B. Sharing atau pertemuan antar kepengurusan Pokja

Berdasarkan hasil penelitian, sharing atau pertemuan antar Pokja sering terjalin dikarenakan bila mengerjakan suatu pendataan selalu berkumpul bersama-sama. Sambil evaluasi diri masing-masing kekurangannya seperti apa. Juga saat melaksanakan proker tidak terpaku kepada tupoksi masing-masing tetapi lebih bersifat saling membantu menjalankan proker.

##### C. Rutin melakukan evaluasi 1 bulan sekali oleh Pokja Kampung KB

Sama halnya dengan perkumpulan sharing. Evaluasi diri masing-masing pun dilakukan oleh setiap Pokja. Adapun kekurangan dan solusi yang ditemukan berdasarkan atas kemampuan terbatas Pokja sendiri. Berinisiatif mengusulkan suatu rancangan yang ketika disampaikan kepada pembina PLKB Non PNS diterima dan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun bila ada permasalahan dicarikan jalan keluar semampu Pokja dibicarakan bersama-sama sebelum

nantinya disampaikan kepada PLKB Non PNS bila diperlukan.

#### 5. Perbaikan Program pada Masa Mendatang

##### A. Adanya peningkatan kualitas SDM Pokja Kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas SDM notabene lulusan SLTP/SLTA. Dalam perumusan proker Pokja ini ketergantungan kepada sekretaris yang memberikan ide untuk berjalannya proker. Kualitas SDM kurang ditambah tidak adanya insentif atau uang lelah sekalipun. Seperti menurut Bhasttacharyya,

‘Insentif dibedakan atas moneter dan non moneter. Insentif moneter adalah insentif yang diberikan kepada kader berupa uang tunai dalam beberapa bentuk seperti bagian pelayanan sipil dan dibayar gaji meskipun dalam jumlah yang kecil, biaya transportasi kegiatan, biaya transportasi pelatihan dan kredit. Sumber pembayaran kader dapat berasal dari masyarakat (kontribusi dari individu rumah tangga), pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau bahkan suatu perusahaan nirlaba. Sumber dana dapat mempengaruhi peran dan kesetiaan kader. Insentif non moneter adalah insentif yang diberikan kepada kader berupa motivasi. Jenis insentif tidak berwujud, tetapi sangat penting untuk kepuasan pekerjaan. Insentif ini termasuk hubungan baik dengan staf kesehatan, perkembangan pribadi, pelatihan dan dukungan rekan.’

Jadi kurang dorongan untuk bekerja melaksanakan proker yang ada. Terlebih bukan hanya itu yang menjadi urusan utama Pokja yang notabene ibu rumah tangga.

Adapun menurut PLKB Non PNS bila ada masalah di Pokja Kampung KB diselesaikan bersama. Walaupun demikian peningkatan kinerja/kualitas pastilah ada seperti dalam hal administrasi menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Menurut hasil observasi, memang benar adanya terkait Pokja yang monoton dalam menyumbangkan ide untuk proker. Lebih dibebankan kepada sekretaris Pokja Kampung KB.

##### B. Optimalnya peran pemerintah serta sektor terkait lainnya

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa peran pemerintah serta sektor terkait belum optimal. Terbukti dengan masih sulitnya Pokja dalam hal anggaran saat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Masih kurangnya koordinasi antara Pokja Kampung KB dengan pihak Desa. Sehingga tidak adanya laporan bulanan ataupun tahunan secara administratif kepada Kepala Desa terkait proker yang telah dilaksanakan oleh Pokja Kampung KB. Dan menyebabkan pihak Desa tidak bisa mengukur dan menentukan proker prioritas yang bisa dimasukkan dalam anggaran desa saat Musdes. Namun di lain sisi terdapat kesalahan pahaman posisi Kepala Desa dalam Kampung KB. Yang seharusnya Kades itu sebagai Pelindung/Penanggung jawab tetapi Kepala Desa sendiri merasa bahwa Kepala Desa sebagai Pembina di Kampung KB. Sehingga Kepala Desa merasa dirinyalah yang perlu membina Kampung KB dan menganggap masih sangat kurang dalam pembinaannya di

Kampung KB. Hal tersebut tidak sesuai dengan peranan/fungsi pengurus Kampung KB sebagai berikut (Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:35) :

1. Penanggung jawab

- a. Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Kampung KB dengan sektor terkait;
- c. Mengusahakan anggaran dari dana Desa serta pihak luar untuk keperluan Kampung KB.

Adapun terkait kerja sama dengan lintas sektor juga dirasa masih kurang. PLKB Non PNS sendiri mengatakan bahwa masih perlu ditingkatkan lagi koordinasi untuk menindaklanjuti perencanaan proker Kampung KB Desa Cibenda dengan beberapa lintas sektor seperti Pertanian, Lingkungan Hidup dan Rumah Zakat.

Berdasarkan hasil observasi, tidak adanya laporan secara administratif dikarenakan SDM di Pokja Kampung KB belum menguasai perangkat/alat yang menunjang untuk pembuatan administrasi secara tertulis seperti laptop. Juga memang tidak ada sarana yang menunjang, maksudnya barang penunjang (laptop) tersebut belum tersedia. Namun telah menjadi bahan pemikiran bagi Pokja juga PLKB Non PNS untuk memenuhi barang penunjang administrasi tersebut yang berasal dari swadaya masyarakat.

C. Kampung KB Dusun Cibenda sebagai miniatur dari 4 dusun lain di Desa Cibenda.

Berdasarkan penelitian, pada dasarnya semua mengakui bahwa Kampung KB Dusun Cibenda ini harus bisa meluas baik dalam hal manfaat atau penerapan programnya untuk 1 wilayah Desa Cibenda. Dibuktikan dengan lebih lengkapnya administrasi mengenai data kependudukan di Dusun Cibenda yang merupakan hasil dari Pokja Kampung KB dibandingkan dengan Dusun yang lain. Sehingga bila ada keperluan mendadak seperti penilaian ataupun hal lainnya di Desa Cibenda, Dusun Cibenda lah yang dipilih untuk mewakili. Selain itu juga, perlu adanya pemahaman masyarakat mengenai Kampung KB dan harus ada SDM yang siap untuk menjadi Pokja Kampung KB yang sifatnya relawan, dalam artian tidak mendapatkan gaji/insentif apapun.

Namun begitu, tidak cukup hanya untuk wilayah 1 Desa saja. Seharusnya Kampung KB Desa Cibenda bisa dijadikan *role model* bagi pembentukan Kampung KB di Desa lain se-wilayah Kecamatan Parigi. Karena Kampung KB Desa Cibenda merupakan Kampung KB perwakilan Kecamatan Parigi pada awal pembentukannya.

Namun berdasarkan observasi, perlu diperbaiki dulu mengenai administrasi Kampung KB Desa Cibenda. Lebih ditata dan dipersiapkan segala hal lain yang kurang. Yang sudah benar-benar siap untuk dijadikan *role model* hanya dalam hal sarana seperti sudah adanya Balai Sawala karena di

Kampung KB lain di Kecamatan Parigi belum memiliki gedung yang permanen seperti halnya di Cibenda.

Kepala Desa pun sangat mendukung bila penerapan Kampung KB tidak hanya sebatas di Dusun Cibenda saja tetapi harus lebih meluas manfaatnya ke seluruh Dusun di Desa Cibenda. Karena bila dampak bisa dirasakan oleh 1 Desa berarti Kampung KB sudah berhasil untuk berkontribusi dalam pembangunan Desa.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut : kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Kampung KB, kurangnya koordinasi antara Pokja dengan Pemerintah Desa, belum optimalnya pembinaan yang dilakukan atau diberikan oleh PLKB Non PNS kepada Pokja, tidak adanya insentif/uang lelah bagi Pokja, SDM Pokja yang masih kurang serta keterbatasan dana dalam mengembangkan potensi-potensi Kampung KB.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Kampung KB, Pokja mengenalkan/melakukan sosialisasi dan perkenalan diri secara bertahap kepada beberapa masyarakat saat menarik sumbangan dari program cinta kasih, Sedang diusahakan dalam menata administrasi oleh pihak PLKB Non PNS dan Pokja sehingga kedepannya bisa ada pelaporan capaian hasil kerja dari

Pokja kepada Pemerintah Desa secara tertulis, Melakukan pendekatan dengan lintas sektor yang dilakukan oleh PLKB Non PNS berupa koordinasi dan komunikasi yang lebih dirutinkan lagi dan Terkait uang insentif/uang lelah pihak PLKB Non PNS telah memikirkan bagaimana ke depannya agar menjadi dorongan semangat dalam melakukan program kerja oleh Pokja.

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana oleh Kepala Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal, dibuktikan dengan tidak adanya koordinasi yang baik antara Pokja Kampung KB dengan Pemerintah Desa dalam hal perencanaan Program Kerja Kampung KB, kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh PLKB Non PNS kepada Pokja Kampung KB sehingga Pokja Kampung KB belum sepenuhnya memahami tupoksinya serta kurang meluasnya pemahaman yang dimiliki masyarakat terkait Kampung KB.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu anggaran belum memadai. Adapun Pemerintah Desa hanya mengalokasikan untuk fisik. Sesuai penuturan dari Kepala Desa bahwa antara Pokja Kampung KB dengan Pemerintah Desa tidak memiliki koordinasi yang baik dalam hal kebutuhan Pokja Kampung KB yang

harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa, karena dalam peng-anggaran dana desa tidak boleh ada program yang tumpang tindih. Adapun APBD diperuntukkan untuk keperluan monev dan dirasa tidak mencukupi bila digunakan untuk pertemuan-pertemuan pelatihan. Juga kurangnya kerja sama antara Pokja dengan pihak lainnya. Dalam hal ini yang berperan tidak hanya Pokja Kampung KB tetapi juga PLKB Non PNS sebagai pembina yang menuntun dan mengarahkan Pokja Kampung KB serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat belum memahami secara menyeluruh tujuan dan pelaksanaan Kampung KB.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu PLKB Non PNS memberikan pemahaman kepada Pokja Kampung KB untuk selalu melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Desa namun tetap ditemukan kendala bahwa Pokja Kampung KB belum menguasai laptop untuk membuat administrasi disamping itu laptop pun belum tersedia. PLKB Non PNS berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan beberapa *stakeholder* untuk membangun relasi agar pelaksanaan kegiatan Kampung KB yang memerlukan kerja sama dengan beberapa pihak dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Kampung KB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ahmad, Susanto (2016). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Prenada Media Group
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin A.J. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Biro Perencanaan BKKBN. (2015). *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta : Biro Perencanaan BKKBN.
- Cheerli dan Ika C.S (Ed.). (2020). *Kampung KB Upaya Nyata Membangun Bangsa*. Jakarta Timur : Yayasan Cipta Cara Padu
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nn. *Pedoman Pengelolaan Kampung KB*. (2017). Jakarta : Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
- Rachmat dan Dadang Gunawan. (2016). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

W. Dunn. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Widodo, J. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing

### **Sumber Dokumen**

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran

Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 476/Kpts.22-Huk/2019 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangandaran

Keputusan Kepala Desa Cibenda Nomor : 411.2/03/Kpts/Ds/2017 tentang Penetapan Pembentukan kampong KB Dusun Cibenda Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

### **Sumber Jurnal**

Rianto Faizal, Neng Suryati Nengsih dan Rendra Setyadiharja. 2019. *Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Tanjungpinang*. E-jurnal Mahasiswa STISIPOL Raja Haji, Indonesia.

Wisnuwardani, Ratih Wirapuspita. 2012. *“Insentif Uang Tunai dan*

*Peningkatan Kinerja Kader Posyandu”*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 7. 45.